



**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 180 / 9 TAHUN 2025**

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan pembentukan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 180/ 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Bupati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI BREBES,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

DJOKO GUNAWAN



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Kabupaten Brebes; dan
6. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 180 / 9 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI

NO	JUDUL	PENGUSUL
1.	PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES	BAGIAN PEREKONOMIAN
2.	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES	BAGIAN PEREKONOMIAN
3.	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	BAGIAN ORGANISASI
4.	KELAS JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	BAGIAN ORGANISASI
5.	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
6.	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
7.	ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
8.	ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS	BAGIAN ORGANISASI
9.	ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN	BAGIAN ORGANISASI
10.	ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN	BAGIAN ORGANISASI

11.	PETA JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	BAGIAN ORGANISASI
12.	ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025 – 2029	BAGIAN ORGANISASI
13.	PEDOMAN TEKNIS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	BAGIAN ORGANISASI
14.	HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BAGIAN ORGANISASI
15.	PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI PERANGKAT DAERAH	BAGIAN PEMBANGUNAN
16.	BATAS DESA BOJONG KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
17.	BATAS DESA BUARAN KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
18.	BATAS DESA JANEGARA KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
19.	BATAS DESA JATIBARANG KIDUL KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
20.	BATAS DESA JATIBARANG LOR KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
21.	BATAS DESA KALIALANG KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
22.	BATAS DESA KALIPUCANG KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
23.	BATAS DESA KARANGLO KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM

24.	BATAS DESA KEBOGADUNG KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
25.	BATAS DESA KEBONAGUNG KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
26.	BATAS DESA KEDUNGTUKANG KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
27.	BATAS DESA KEMIRIAMBA KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
28.	BATAS DESA KENDAWA KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
29.	BATAS DESA KERTASINDUYASA KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
30.	BATAS DESA KLAMPIS KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
31.	BATAS DESA KLIKIRAN KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
32.	BATAS DESA KRAMAT KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
33.	BATAS DESA PAMENGER KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
34.	BATAS DESA PEDESLOHOR KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
35.	BATAS DESA RENGASBANDUNG KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
36.	BATAS DESA TEGALWULUNG KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
37.	BATAS DESA TEMBELANG KECAMATAN JATIBARANG	BAGIAN TAPEM
38.	RENCANA AKSI STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH KABUPATEN BREBES 2025-2030	BAGIAN TAPEM

39.	LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	BAGIAN TAPEM
40.	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2026	BAPERLITBANGDA
41.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2025	BAPERLITBANGDA
42.	PENGARUSUTAMAAN GENDER	BAPERLITBANGDA
43.	KABUPATEN LAYAK ANAK	BAPERLITBANGDA
44.	PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH	BAPERLITBANGDA
45.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BREBES	BAPERLITBANGDA
46.	TENAGA KERJA MAKRO KABUPATEN BREBES TAHUN 2024-2029	DINPERINAKER
47.	TATA KELOLA PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	DINPERINAKER
48.	BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	DINPERINAKER
49.	MANAJEMEN KARIER PNS	BKPSDMD
50.	PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ASN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	BKPSDMD
51.	DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	BKPSDMD
52.	PERLINDUNGAN POHON	DLH
53.	STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2027	BPKAD

54.	HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2027	BPKAD
55.	ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2027	BPKAD
56.	STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2027	BPKAD
57.	PEDOMAN PENGELOLAAN BONGKARAN BEKAS GEDUNG DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	BPKAD
58.	PERUBAHAN PERBUP BREBES NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
59.	PERUBAHAN PERBUP BREBES NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
60.	PERUBAHAN PERBUP BREBES NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
61.	PERUBAHAN PERBUP BREBES NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
62.	PETUNJUK TEKNIK INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH	BPKAD
63.	PERUBAHAN KEDUA PERBUP BREBES NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN	BPKAD

	HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	
64.	PERUBAHAN KEDUA PERBUP BREBES NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
65.	PERUBAHAN KEDUA PERBUP BREBES NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
66.	PERUBAHAN KEDUA PERBUP BREBES NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
67.	PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH	BPKAD
68.	PERUBAHAN KETIGA PERBUP BREBES NOMOR 43TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
69.	PERUBAHAN KETIGA PERBUP BREBES NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
70.	PERUBAHAN KETIGA PERBUP BREBES NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
71.	PERUBAHAN KETIGA PERBUP BREBES NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA	BPKAD

	UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	
72.	PERUBAHAN KEEMPAT PERBUP BREBES NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
73.	PERUBAHAN KEEMPAT PERBUP BREBES NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
74.	PERUBAHAN KEEMPAT PERBUP BREBES NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025	BPKAD
75.	PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES	BPKAD
76.	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BREBES	DINBUDPAR
77.	TATA CARA PENGELOLAAN OBYEK WISATA DAN ASET DAERAH DI LINGKUNGAN OBYEK WISATA/SARANA PEMERINTAHAN KABUPATEN BREBES	DINBUDPAR
78.	PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES	BAGIAN PEREKONOMIAN
79.	PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK BREBES	BAGIAN PEREKONOMIAN
80.	TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH	BAGIAN PEREKONOMIAN
81.	KAWASAN TANPA ROKOK	DINKES
82.	FASILITASI PENGEMBANGAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
83.	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025	DINPERMADES
84.	ALOKASI DANA DES	DINPERMADES
85.	DANA DESA	DINPERMADES

86.	BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN	DINPERMADES
87.	PENGELOLAAN ASET DESA	DINPERMADES
88.	TATA KELOLA ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BAKESBANGPOL
89.	FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA	BAKESBANGPOL
90.	PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI	INSPEKTORAT
91.	STAF KHUSUS BUPATI	BKPSDMD
92.	PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES

Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

